

DEREKONSTRUKSI KOMUNIKASI SOSIAL KESETARAAN GENDER: DALAM SISTEM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA

Nurul Azizah

nurulazizah@ibrahimy.ac.id

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Secara konvensional konstruksi sosial masyarakat kesetaraan gender mampu meningkatkan kesadaran pendidikan dalam budaya patriarki di Indonesia. Konstruksi kesetaraan gender dan keadilan gender dilakukan oleh orang yang mempunyai kepedulian terhadap peran dan kiprah perempuan secara khusus dan masyarakat dalam bidang pendidikan. *Afirmasi top down* dilakukan berbagai aksi dan gerakan kesetaraan gender. Perempuan yang menjadi objek dari gerakan kesetaraan, untuk meningkatkan kesadaran dan keadilan gender di bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan di era digitalisasi seperti sekarang ini, mampu mentransformasi paradigma berfikir perempuan. Mereka ikut aktif berpartisipasi nyata dalam pembangunan melalui pendidikan. Meskipun melalui berbagai tantangan dan rintangan karena berada dalam budaya patriarki, dimana level kaum perempuan berada tingkatan rendah dibandingkan laki-laki. Tulisan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dan budaya patriarki, tantangan faktual secara teoritis dalam meningkatkan kesetaraan gender, upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pendidikan, Implementasi kesetaraan gender dibidang pendidikan dalam konteks sosial masyarakat. Tulisan ini menyarankan perlunya pemberian akses dan kesempatan pada kaum perempuan, kebijakan publik yang berorientasi bias gender, melibatkan partisipasi perempuan, sehingga mampu memberikan azas kemanfaatan yang berkeadilan bagi perempuan diantaranya adalah melalui pendidikan dengan pemberian akses yang cukup kepada perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, keadilan gender, sistem pendidikan, budaya patriarki, kontruksi sosial masyarakat

Abstract

Conventionally, the social construction of a gender equality society is able to increase awareness of education in a patriarchal culture in Indonesia. The construction of gender equality and gender justice is carried out by people who have concern for the role and progress of women in particular and society in the field of education. Top down affirmations are carried out by various gender equality actions and movements. Women who are the object of the equality movement, to increase gender awareness and justice in the field of education. Along with the times and in the era of digitalization as it is today, it is able to transform the paradigm of women's thinking. They take an active part in real development through education. Despite going through various challenges and obstacles due to being in a patriarchal culture, where the level of women is lower than that of men. This paper shows that gender equality in education and patriarchal culture, theoretically factual challenges in increasing gender equality, efforts to increase women's awareness of the importance of education, implementation of gender equality in education in the social context of society. This paper suggests the

need to provide access and opportunities for women, public policies that are gender-biased oriented, involve women's participation, so as to be able to provide a just principle of benefit for women, one of which is through education by providing sufficient access to women.

Keywords: Gender Equality, gender justice, education system, patriarchal culture, social construction of society

Pendahuluan

Meskipun sudah berlangsung lama dan telah menjadi konstruksi sosial budaya di masyarakat (Kapitány-Fövény et al., 2022), namun permasalahan ketidaksetaraan gender, ketidakadilan gender menjadi fenomena sosial (Ryan et al., 2020). Sehingga membutuhkan perhatian serius oleh semua kalangan guna menemukan solusi yang terbaik, hal inilah yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Roy Lin et al., 2021). Fenomena masih terjadinya ketidaksetaraan bias gender, lebih tantangan mewujudkan kesetaraan gender disebabkan masih berlangsungnya budaya patriarki yang dianut oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Pandangan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih perkasa, lebih berhak menduduki peran-peran penting telah mengkonstruksi tatanan budaya yang lebih memihak laki-laki dari pada perempuan. Konstruksi budaya ini terus berlangsung dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat kita susah membedakan antara apa yang disebut “kodrat” dengan “konstruksi budaya” sebagai produk hasil cipta karya manusia (Pinto et al., 2019).

Untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran dalam sistem pendidikan Indonesia, menghadapi dua hal yaitu tantangan dan upaya aksi nyata. Pentingnya tulisan ini untuk melengkapi kekurangan kajian-kajian sebelumnya, tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Studi-studi yang ada sejauh ini membicarakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Keterbatasan dari studi yang ada hanya membahas bagaimana meningkatkan kesetaraan gender tanpa melihat tantangan dan upaya dalam meningkatkan kesadaran perempuan dalam bidang pendidikan khususnya pada sistem budaya patriarki seperti di Inonesia.

Tujuan tulisan ini antara lain; (1) bagaimana mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan dan budaya patriarki, (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi tantangan faktual secara teoritis dalam meningkatkan kese-

taraan dan bagaimana upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pendidikan?, (3) Bagaimana implementasi kesetaraan gender dibidang pendidikan dalam konteks sosial masyarakat.

Tulisan ini menganalisa beberapa argumentasi tentang isu kesetaraan gender, subordinasi dan ketidakadilan gender, stereotype yaitu citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan.

Gender Equality

Jenis kelamin perempuan dikaitkan dengan kepercayaan diri yang lebih buruk melakukan keterampilan prosedural. Tren ini yang telah dikuatkan dalam studi lain tentang pendidikan medis dan bedah berdampak pada setengah dari tenaga kerja bedah potensial dan harus dianggap sangat penting mengingat meningkatnya minat dalam karir bedah yang ditunjukkan oleh siswa perempuan kami. Hambatan yang umum dilaporkan untuk mencapai kemampuan teknis termasuk kurangnya peluang yang diberikan oleh penduduk dan konsultan, tekanan waktu, dan kurangnya kepercayaan diri. Penting bagi pendidik untuk menyadari perbedaan gender ini dan untuk secara aktif mempromosikan kesempatan belajar yang adil bagi peserta pelatihan perempuan untuk menarik siswa kedokteran yang paling mampu, terlepas dari jenis kelamin, kepada generasi ahli bedah masa depan.

Di Spanyol (Palomares-Ruiz et al., 2021) artikel ini menyajikan penelitian dengan tujuan menganalisis penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemberdayaan, kewirausahaan, dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat saat ini. Kami memeriksa kesenjangan gender digital dalam studi sarjana di Spanyol oleh cabang pendidikan dan hubungannya dengan tingkat afiliasi dengan Jaminan Sosial lulusan Gelar dan Siklus se-

telah satu, dua dan tiga tahun dari penyelesaian studi universitas mereka. Hal ini dilengkapi dengan studi kasus untuk sampel dipasangkan dengan metode kuasi-eksperimental, untuk menentukan apakah hipotesis alternatif ketidaksetaraan gender dalam cara nilai, sebagai penilaian kinerja akademik, dapat diterima antara dua orientasi subjek diajarkan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam kelompok eksperimental, motivasi yang lebih tinggi dan dalam mempelajari skor yang lebih tinggi, dibandingkan dengan kelompok kontrol, tidak menemukan perbedaan gender yang signifikan secara statistik dalam kinerja akademik.

Partiarkhi Culture

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Atmadja et al., 2015; Purwanto, 2019b). Lebih jauh, Patriarki sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas. Patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual (ARISTO, 2018; Nugroho Anggun, 2018; Prihatini, 2020).

Junaidi mengatakan bahwa patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan (Junaidi, 2017) dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua lini kehidu-

pan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Astuti, Wardatun et al, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (Astuti et al., 2019; Wardatun et al., 2015).

Pada kesempatan yang lain, Acker, J mengatakan bahwa permasalahan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi resource yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan tantangan mewujudkan kesetaraan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan (Acker, 1990).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dikembangkan dengan menggunakan fenomenologi yang dimaksudkan terutama untuk menggambarkan gejala-gejala keagamaan menurut perspektif subjek penelitian. Perhatian utama diarahkan pada kesadaran dan pengetahuan mata pelajaran yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan keagamaan. Ini mengacu pada perilaku keagamaan yang terjadi selama Pembatasan Sosial Berkumpul Berbatas (PSBB) atau penguncian sosial. Data diperoleh dari informasi, artikel, berita online di internet terkait tentang tantangan da-

lam meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender dalam budaya patriarki di Indonesia. Fenomenologi sebagai metodologi bertujuan untuk menemukan makna otentik meningkatnya kesetaraan gender terutama dalam bidang pendidikan mampu meluruskan budaya patriarki yang ada di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kesetaraan Gender : Dalam Pendidikan Dan Budaya Patriarkhi.

Menurut kajian penelitian dari berbagai penulis, bahwa budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Azizah, 2014; Gulo, 2019; Natar, 2019; Whitehead, 2019). Berdasarkan tesis di atas, maka mewujudkan kesetaraan gender bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu bangsa, meskipun budaya patriarki sudah berlangsung lama. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena merubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu. Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, termasuk yang menganut budaya patriarki. Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka (Aluf, Wilda ;Azizah, Nurul; Ainiyah, 2021).

Dengan kata lain, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan. Berawal dari miskin pendidikan, dampaknya akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada

aspek yang lainnya, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak mempunyai sumber daya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berubah tinggi. Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga. Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangannya. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan

2. Tantangan Faktual Secara Teoritis Dalam Meningkatkan Kesetaraan

Berbagai hasil penelitian mengungkapkan, bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat beberapa faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni tantangan mewujudkan kesetaraan gender (Amalia, n.d.; Nzomo, 1995; Umar, n.d.) antara lain faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Dalam pendidikan, faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki (*bias toward male*). Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi yang mayoritas adalah laki-laki. Selain itu, jumlah tenaga pengajar, khususnya pada SLTP ke atas lebih didominasi laki-laki. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi bias laki-laki (*bias against female*). Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas gen-

der masyarakat, baik laki-laki dan perempuan masih sangat rendah. Selain akses, faktor kontrol juga turut andil dalam mewujudkan bias gender (Azizah, 2015; Eriyanti, 2017; Hasanah, 2019; Muhammad, 2014; Purwanto, 2019a). Pada aspek pendidikan, kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi laki-laki, mengingat laki-laki lebih banyak berada pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam jabatan struktural, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Hal itu menyebabkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan relatif masih rendah. Akibatnya, sejumlah kebijakan dalam pendidikan dipandang belum sensitif gender.

3. Kesadaran Perempuan Terhadap Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, termasuk yang menganut budaya patriarki. Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan. Berawal dari miskin pendidikan, dampaknya akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada aspek yang lainnya, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak mempunyai sumber daya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berubah tinggi.

Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupa rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga. Ketimpangan gen-

der dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangan. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender dalam pendidikan dapat pula diamati dari segi isi buku pelajaran. Kebanyakan muatan buku pelajaran, khususnya Bahasa dan Sastra, IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Kesenian dan sejenisnya, yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung masih menganut nilai-nilai yang bias gender.

Perempuan dalam buku-buku tersebut masih ditempatkan dalam peran-peran domestik (*domestic roles*), sebaliknya laki-laki diposisikan dalam peran-peran publik (*productive roles*). Dengan demikian, isi buku-buku tersebut masih mengakui adanya segregasi ruang yang ketat antara laki-laki dan perempuan; laki-laki di ruang publik, sedangkan perempuan di ruang domestik. Kurikulum dan materi pelajaran yang belum mengacu kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender akan menyebabkan perempuan tetap tidak mempunyai mentalitas sebagai warga masyarakat yang produktif.

Simpulan

Mewujudkan keadilan sosial di antaranya dengan mewujudkan kesetaraan gender, pada hakekatnya merupakan kepentingan bersama. Karena ketidakadilan, dimanapun muaranya adalah terciptanya tatanan sosial yang tidak nyaman, alienasi, bahkan bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender, dengan mengubah budaya.

Tulisan ini menyarankan perlunya pemberian akses dan kesempatan pada kaum perempuan, kebijakan publik yang berorientasi

bias gender, melibatkan partisipasi perempuan, sehingga mampu memberikan azas kemanfaatan yang berkeadilan bagi perempuan diantaranya adalah melalui pendidikan dengan pemberian akses yang cukup kepada perempuan.

Daftar Pustaka

- Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A Theory of Gendered Organizations. *Gender & Society*, 4(2), 139–158. <https://doi.org/10.1177/089124390004002002>
- Aluf, Wilda ;Azizah, Nurul; Ainiyah, N. (2021). Strategi komunikasi organisasi IKMASS pada ukhuwah Islamiyah antar alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. *Maddah*, 3(1), 32–44.
- Amalia, M. (n.d.). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural". *Jurnal Wawssan Hukum*, 25, 2.
- ARISTO, J. (2018). *Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak*. 5(1), 141–162. <https://doi.org/10.31227/osf.io/sbwe7>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13.
- Atmadja, N. B., Sendratari, L. P., & Rai, I. W. (2015). Deconstructing Gender Stereotypes in Leak. *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE*. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3597>
- Azizah, N. (2014). Perempuan pemenang pemilu: studi prespektif gender dan meluruhnya budaya patriarki di provinsi Jawa Timur. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, XIII(No 2), 153–164. <https://doi.org/10.24014/marwah.v13i2.886>
- Azizah, N. (2015). PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM SEBAGAI RUMAH ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus di DPW PPP Jatim). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 161. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.528>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jsp.18002>
- Gulo, Y. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarki terhadap Perempuan di Nias. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12305>
- Hasanah, U. (2019). GENDER DALAM DAKWAH UNTUK PEMBANGUNAN (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2). <https://doi.org/10.21580/jid.v38.2.3887>
- Junaidi, H. (2017). Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran. *An Nisa'a*, 12(1).
- Kapitány-Fövény, M., Lukács, J. Á., Takács, J., Kitzinger, I., Soósné Kiss, Z., Szabó, G., Falus, A., & Feith, H. J. (2022). Gender-specific pathways regarding the outcomes of a cyberbullying youth education program. *Personality and Individual Differences*, 186(October 2021). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111338>
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Natar, A. N. (2019). Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.133-147>
- Nugroho Anggun. (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Nzomo, M. (1995). The political economy of the African crisis: Gender impacts and responses. *International Journal*, 51(1), 78–100. <https://doi.org/10.2307/40203752>
- Palomares-Ruiz, A., Cebrián-Martínez, A., García-Toledano, E., & López-Parra, E.

- (2021). Digital gender gap in university education in Spain. Study of a case for paired samples. *Technological Forecasting and Social Change*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121096>
- Pinto, M., Sales, D., & Fernández-Pascual, R. (2019). Gender perspective on information literacy: An interdisciplinary and multidimensional analysis within higher education settings. *Library and Information Science Research*, 41(4), 100979. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.100979>
- Prihatini, E. S. (2020). Women and social media during legislative elections in Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 83(October 2019), 102417. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102417>
- Purwanto, T. (2019a). Kesetaraan gender dan relasi dalam tafsir Al-Qur'an tematik kementerian agama Republik Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.5052>
- Purwanto, T. (2019b). *KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR 'AN TEMATIK A . Pendahuluan Kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu yang terus bergulir dan diperjuangkan dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang kesetaraan dan keadilan gender (. 12(1), 30–63.*
- Roy Lin, C. Y., Rosendale, N., & Deeb, W. (2021). Expanding sexual and gender minority research in movement disorders: More than awareness and acceptance. *Parkinsonism and Related Disorders*, 87(March), 162–165. <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2021.05.019>
- Ryan, J. F., Istl, A. C., Luhoway, J. A., Davidson, J., Christakis, N., Bütter, A., & Mele, T. S. (2020). Gender Disparities in Medical Student Surgical Skills Education. *Journal of Surgical Education*, 519, 850–857. <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2020.09.013>
- Umar, N. (n.d.). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*.
- Wardatun, A., Amrullah, A., & Musta'in, M. (2015). CONFIRMING DOMESTIC IDENTITY, SUPPORTING PUBLIC COMMITMENT (The Case of Tuan Guru's Wife in Lombok West Nusa Tenggara Eastern Indonesia). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.171-184>
- Whitehead, A. (2019). Is a “Christian America” a More Patriarchal America? Religion, Politics, and Traditionalist Gender Ideology. *Canadian Review of Sociology*, 56 (2), 151–177. <https://doi.org/10.1111/cars.12241>